



Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim I No.3 Banda Aceh (0651) 637433

# PERUBAHAN RENCANA KERJA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK TAHUN 2025



[rsia.acehprov.go.id](http://rsia.acehprov.go.id) 

[rsiaacehprov](#) 

[rsia aceh](#) 

[rsiaaceh](#) 

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Renstra 2023- 2026.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	11
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	12
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal .....	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	21
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b>	
3.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kaidah Pelaksanaan.....	27
4.2 Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian.....	27
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan .....	9
Tabel 2.2	Capaian kinerja Pelayanan 2025 .....	11
Tabel 2.3	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal Tahun 2025.....	20
Tabel 2.5	Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....	23
Tabel 3.1	Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan ibu dan anak Pemerintah Aceh perlu dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan dokumen, salah satunya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023 – 2026.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara serta masih jauh dari target global SDGs untuk menurunkan AKI menjadi kurang dari 70 per 100.000 KH pada tahun 2030. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya yang lebih strategis dan komprehensif. Penyebab kematian langsung kematian ibu adalah gangguan hipertensi dalam kehamilan (33,1%), pendarahan obstetrik (27,03%), komplikasi non-obstetrik (15,7%), komplikasi obstetrik lainnya (12,04%), infeksi yang berkaitan dengan kehamilan (6,06%), dan penyebab lain (4,81%) (SRS 2016). Penyebab kematian ibu ini menunjukkan bahwa kematian maternal dapat dicegah apabila cakupan pelayanan dibarengi dengan mutu pelayanan yang baik. Kejadian kematian ibu sebanyak 77% ditemukan di rumah sakit, 15,6% di rumah, 4,1% di perjalanan menuju RS/fasilitas kesehatan, dan 2,5% di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (SRS 2016).

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Aceh adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi yang mempunyai tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta menjalankan fungsi sosialnya terutama pelayanan bagi keluarga kurang mampu/miskin. Sedangkan

pengelolaannya dilakukan dengan prinsip Badan Layanan Umum Daerah yang sesuai dengan amanat UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Sebagai sebuah instansi sektor publik bidang kesehatan ibu dan anak Pemerintah Aceh, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak (BLUD RSIA) Pemerintah Aceh mempunyai tekad untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Aceh, mengembangkan produk layanan sehingga menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai pusat rujukan terpercaya bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Aceh. Tekad tersebut dapat terealisasi dengan baik bila dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berkesinambungan sehingga perlu disusunnya Rencana Kerja (Renja). Renja tersebut mengakomodir perubahan dan adaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks, mengelola keberhasilan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, mengefektifkan komunikasi internal dan eksternal, pemanfaatan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan produktifitas.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPA adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPA dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA-P) Provinsi Aceh Tahun 2025 dimana tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan rencana strategis SKPA untuk tahun rencana yang dimaksud. Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis SKPA ke dalam program dan kegiatan tahunan SKPA sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program SKPA secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPA.

## **1.2.Landasan Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman susunan dan organisasi tata kerja rumah sakit daerah.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MenKes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah,
12. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 61/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit ,
14. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/Menkes/SK/II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis tentang penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan minimal Rumah Sakit
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan ini telah diundangkan oleh Kemenkumham tanggal 25 September 2017 dengan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
21. Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat aceh.
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 142 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (P-RKPA) Tahun 2025
25. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/688/2011 tentang Penetapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi :

- a. Sebagai dokumen perencanaan dan dasar untuk penyusunan KUA dan PPAS
- b. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Aceh untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan

rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesuai Renstra BLUD RSIA 2023 – 2026.

- c. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) BLUD RSIA.

### **1.3.2. Tujuan**

Agar tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan BLUD RSIA Pemerintah Aceh sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSIA adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis RSIA tahun 2023 – 2026 dan mendukung visi misi Gubernur Tahun 2025-2030 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan, pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2025.
2. Menjadi acuan bagi RSIA dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2025 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
3. Menciptakan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Perubahan Renja 2025

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024**

Pada evaluasi pelaksanaan renja tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun 2025 dan renstra tahun 2023-2026, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi, rewi terhadap rancangan awal.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSIA**

Pada tujuan dan sasaran memuat Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perubahan Renja 2025.

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada penutup memuat penutup dari perubahan Renja tahun 2025.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Renstra 2023 – 2026.**

Salah satu indikator yang menunjukkan tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBA. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pada proses penyusunan anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 disahkan pada 12 Februari 2025 dengan pagu sebesar Rp127.370.758.157. Sehingga pelaksanaan kegiatan Renja tahun 2025 hingga 26 Maret 2025 baru dilaksanakan selama 1,5 bulan. Pada renja tahun 2025 terdapat 2 program, 8 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan realisasi keuangan sampai dengan 26 Maret 2025 mencapai Rp18.300.428.723 (14,37%) dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp17.971.828.723 dan Belanja Modal masih Rp328.600.000. Sedangkan pendapatan yang diperoleh oleh RSIA sebagai BLUD sampai dengan 26 Maret 2025 sebesar Rp6.031.301.097 (17,03%). Pelaksanaan evaluasi ini sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengukur sejauhmana program atau kegiatan pada tahun 2025 sudah berjalan. Adapun Rekapitulasi Hasil dan Pencapaian Renstra yang memuat realisasi target pada tahun yang sudah berjalan, 2024 dan 2025, tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( <i>OUTCOME</i> ) / KEGIATAN ( <i>OUTPUT</i> )	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2024	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN 2024	
			TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
1 0 2 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95					95		
1 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	100					100		
0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	303 orang	260 orang	260 orang	260 orang	100%	263 orang	261 orang	86%
1 0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	100					90		
0 9	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 orang	15 orang	2 orang	2 orang	100%	0 orang	17 orang	21%
1 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Kelengkapan Logistik Rumah Sakit	100					95		
0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	0,6 Kegiatan	60%
0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	0,6 Kegiatan	20%
0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	0,6 Kegiatan	30%
0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	0,6 Kegiatan	30%
0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	0,6 Kegiatan	60%
0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 orang	11 orang	8 orang	8 orang	100%	-	19 orang	48%
1 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Rumah Sakit	100					100		
0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	0,6 Kegiatan	30%
0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	50%
0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	-	0,6 Kegiatan	30%
0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	2 kegiatan	3 kegiatan	75%



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

### 2.2.1. Kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator NSPK, SPM dan IKK dan indikator kinerja lainnya.

**Tabel 2.2 Capaian kinerja pelayanan 2025**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	Jumlah Kunjungan Pasien		
			2024	Per Feb 2025	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	9
1	IGD	PASIEN	12.450	1.961	16%
2	RAWAT JALAN	PASIEN	22.113	3.627	16%
3	RAWAT INAP	PASIEN	7.288	1.250	17%

Dari tabel diatas rata – rata capaian kinerja pelayanan tahun 2025 sampai dengan Februari 2025 mencapai 16%. RSIA akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas agar jumlah pasien IGD dan Rawat Inap dapat melebihi tahun 2025.

Selain peningkatan jumlah kunjungan pasien, Indikator ketercapaian kinerja RS Ibu dan Anak juga dapat diidentifikasi oleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahunnya, yang juga merupakan standar baku yang tertera dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 dan sesuai dengan amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan kinerja perangkat daerah, IKM dan indikator lain-lain, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah tenaga Spesialis Anak dan Obgyn yang mendapatkan kesempatan sesuai jenis sub konsultan yang dibutuhkan.			3	3	3	3	3	3	3	3	
2	% SDM Tersertifikasi			50%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	
3	Tingkat Keandalan sarana dan prasarana medis sesuai best practice			75%	80%	90%	100%	75%	80%	90%	100%	
4	Level Integrasi SIMRS			Basic/ Siloed 1	Standar/ Siloed 2	Advance/ Integrated 1	Dynamic/ Integrated 2	Basic/ Siloed 1	Standar/ Siloed 2	Advance/ Integrated 1	Dynamic/ Integrated 2	
5	Tersedianya Dokumen Perencanaan Terintegrasi pada RS			1	1	1	1	1	1	1	1	
6	% ketersediaan PPK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	% Kasus Sesuai dengan PPK			70%	80%	90%	100%	70%	80%	90%	100%	
8	% Kepatuhan layanan sesuai PPK			50%	60%	75%	80%	70%	60%	75%	80%	
9	% Alur Layanan yang sudah direvisi dan dilakukan perbaikan secara kontinyu			80%	90%	100%	100%	80%	90%	100%	100%	
10	Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan			< 120 menit	< 90 menit	< 80 Menit	< 60 Menit	< 120 menit	< 90 menit	< 80 Menit	< 60 Menit	
11	Waktu Tunggu Layanan Radiologi			< 6 Jam	< 5 Jam	< 4 jam	< 3 Jam	< 6 Jam	< 5 Jam	< 4 jam	< 3 Jam	
12	% penurunan jumlah pemeriksaan radiologi keluar RS			5%	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	
13	% penilaian indikator Mutu Nasional di rumah sakit			50%	70%	90%	100%	50%	70%	90%	100%	
14	% kelulusan standar Akreditasi			80%	80%	80%	80%	90%	80%	80%	80%	
15	% Kelulusan standar sertifikasi syariah			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
16	% Ketua dan Anggota Komite terlatih			80%	100%	100%	1%	80%	100%	100%	1%	
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan rumah sakit			82,50	83,75	85	86,25	84,7	83,75	85	86,25	
18	Nilai Evaluasi Laporan Kinerja (LKJ)			B	B	B	B	A	B	B	B	
19	% peningkatan jumlah rujukan dari FKTP dan RS Lain			50%	65%	80%	90%	50%	65%	80%	90%	
20	Current Ratio			2	2	2	2	2	2	2	2	
21	Ratio Modal terhadap Total Aktiva			≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	
22	Kasus Kelainan Tumbuh Kembang yang terdeteksi			3	5	10	15	3	5	10	15	
23	Kemampuan Menangani BBLSR <1500 gr			50%	60%	70%	80%	50%	60%	70%	80%	
24	% Kasus Bedah Anak dan Bedah Saraf yang dilayani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
25	% Pasien SC yang terlayani dengan metode ERACS			20%	40%	50%	60%	20%	40%	50%	60%	
26	% Kepuasan Pasien yang mendapatkan Layanan SC Metode Eracs			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

Dari tabel diatas terdapat 26 indikator kinerja pelayanan pada renstra 2023 – 2026 yang dinilai setiap tahun untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

#### 2.3.1. Uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Rakerkesnas secara khusus bertujuan untuk menyusun rencana aksi daerah (RAD) baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam pembangunan kesehatan di wilayahnya. Hal ini merupakan benang merah dari tema besar yang diusung pada gelaran Rakerkesnas 2019, yaitu "Sinergisme Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan *Universal*

*Health Coverage* (UHC) Melalui Percepatan Eliminasi Tuberkulosis, Penurunan Stunting dan Peningkatan Cakupan serta Mutu Imunisasi". UHC merupakan suatu keadaan di mana setiap orang dapat menerima kebutuhan dasarnya berupa layanan kesehatan, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif demi tercapainya status kesehatan yang lebih baik, tanpa adanya kekhawatiran kesulitan finansial dalam mengaksesnya.

Selain itu, isu terkait dengan berlakunya Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur peningkatan mutu standar pelayanan melalui Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS paling lambat pada 30 Juni 2025, juga akan menjadi perhatian RS Ibu dan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kepesertaan dan tingginya angka pemanfaatan di hilir alur sistem pembangunan kesehatan tentu perlu diimbangi dengan kecukupan jumlah dan distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes), baik di tingkat primer maupun rujukan. Karena itu, penguatan Fasyankes menjadi salah satu komitmen utama pemerintah untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Gubernur Aceh tahun 2025 juga berusaha melakukan percepatan pencapaian visi dan misi melalui misi kelima, *Quick Win* kesatu, dan Astacita keempat. Adapun focus RSIA dalam percepatan tersebut adalah :

1. Pelayanan Fetomaternal dan Pelayanan Rehabilitasi Anak berkebutuhan Khusus

2. Perbaikan Transparansi Tata Kelola manajemen sehingga menambah pendapatan BLUD
3. Pengembangan Lahan RSIA sampai ke RSGM

**2.3.2. Uraian tentang permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah.**

Kemampuan manajemen rumah sakit yang profesional, Rumah Sakit Ibu dan Anak memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan Kesehatan ibu dan anak meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Dalam menjalankan fungsi ini, terdapat sebuah indikator utama yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM RSIA pada tahun 2024 mencapai 82,25, sudah mencapai 98% target. Masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang masih perlu diselesaikan pada tahun 2025, diantaranya :

- Belum tersedianya dokter spesialis Radiologi yang definitif
- Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia
- Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana
- Belum optimalnya penerapan E-Rekam medis dan SIMRS
- Standarisasi Pelayanan Rawat Inap sesuai Perpres Nomor 59 tahun 2024

**2.3.3. Uraian tentang dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB.**

Pengembangan Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit (SPM) adalah satu isu penting dan terkini dalam pengembangan manajemen mutu di rumah sakit. Standar pelayanan minimal rumah sakit menjadi perhatian utama dari sebagian besar rumah sakit pemerintah karena SPM merupakan salah satu persyaratan bagi rumah sakit untuk menjadi Badan Layanan Umum daerah (BLUD) yaitu sebuah rumah sakit pemerintah yang diberi keleluasaan pengelolaan keuangan disamping itu juga rumah sakit diuntut untuk dapat menunjukkan akuntabilitasnya dengan senantiasa memenuhi standar.

Dengan penerapan Standar pelayanan minimal Rumah sakit sesuai dengan indikator-indikator dan target yang telah disusun maka akan berdampak sangat signifikan terhadap capaian program nasional dan internasional seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama di pelayanan primer dan rujukan sehingga akan berdampak terhadap capaian penurunan angka kematian terutama kematian ibu dan anak.

Adapun isu penting terbaru adalah Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur peningkatan mutu standar pelayanan melalui Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS, pelaksanaan Perpres ini memiliki korelasi secara langsung dengan BPJS Kesehatan, sehingga kekurangan atas pemenuhan standarisasi layanan

rawat inap akan berdampak terhadap keberlanjutan Kerjasama RSIA sebagai rumah sakit pemerintah.

#### **2.3.4. Uraian tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah.**

Rumah Sakit masa kini menghadapi tantangan-tantangan berat, termasuk menghadapi era globalisasi. Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan serta investasi adalah lahan dasar untuk sistem pasar bebas. Pasar bebas berarti persaingan bebas, termasuk persaingan bebas dalam jasa pelayanan kesehatan. Untuk dapat berkompetisi dalam globalisasi kita harus menerapkan rencana strategis untuk meningkatkan SDM terutama dokter dengan tujuan mengubahnya menjadi faktor kekuatan (strength) kompetitif. Sikap beraliansi dan bersinergi antara dokter dan rumah sakit masih sangat perlu untuk dikembangkan. Dalam menghadapi kompetisi global, para ahli berpendapat, bahwa aliansi, sinergi, kompetisi, dan ko-kreasi adalah kekuatan utama yang juga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi globalisasi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, rumah sakit terus berbenah diri. Yaitu dengan mengatasi kelemahan-kelemahan yang menghambat untuk dapat bersaing secara global, dengan cara-cara:

1. Menyempurnakan sistem informasi manajemen rumah sakit.
2. Menyempurnakan sarana dan prasarana untuk mendukung manusia.
3. Melakukan perubahan dalam manajemen rumah sakit.

**2.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan.**

BLUD RSIA adalah rumah sakit baru yang sedang berkembang sehingga masih diperlukan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas melalui akreditasi, BLUD RSIA sampai saat ini masih tipe B Khusus.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi BLUD RSIA, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L serta telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat ditentukan isu – isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh BLUD RSIA yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan Jumlah sumber daya manusia rumah sakit dalam pengembangan pelayanan kekhususan RSIA.
2. Meningkatkan Kualitas gedung rumah sakit yang memerlukan perawatan secara menyeluruh.
3. Penyediaan alat kesehatan dan farmasi.
4. Peningkatan Mutu dan keselamatan pasien masih perlu ditingkatkan secara terus menerus.
5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi efektif, efisien, transparan, dan informatif.

## **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal**

### **2.4.1. Uraian tentang perbandingan antara rancangan awal RKPA dengan analisis kebutuhan.**

Penyusunan Renja tahun 2025 berpedoman pada RPA 2023 – 2026. Rancangan awal RKPA merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPA dalam menyusun rancangan Renja SKPA dan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah RPJM Nasional di Dalam rancangan awal RKPA tercantum program-program yang di jadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah Aceh dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk di jadikan rencana Pembangunan Aceh.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah aceh (RKPA) tahun 2025 sebesar Rp127.370.758.157,-. Namun, setelah berjalannya tahun sampai dengan 26 Februari 2025 yang hanya berjalan 1,5 bulan, masih belum terdapat perubahan pada jumlah total pagu.

### **2.4.2. Uraian tentang alasan perbandingan tersebut dilaksanakan.**

Perbandingan antara rancangan awal RKPA-P dengan analisis kebutuhan bertujuan untuk melihat sejauh mana pencapaian target kinerja program, isu dan permasalahan yang dihadapi dan indikasi prioritas program pada tahun rencana. Disamping itu rancangan akhir juga harus mempertimbangkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang

tahunan daerah dengan mengacu pada rancangan RKPA-P. Oleh karena itu perbandingan antara rancangan awal dengan analisis kebutuhan sangat dibutuhkan untuk keselarasan dan menampung usulan kebutuhan terkini.

**2.4.3. Penjelasan tentang temuan dan catatan penting jika terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD seperti rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD termasuk perbedaan besaran anggaran dan kinerja.**

Dalam RKPA RSIA terdapat 2 Program dan 8 Kegiatan serta 11 Sub Kegiatan. Tidak terdapat perubahan total pagu antar rencana awal dengan rancangan akhir renja perubahan tahun 2025.



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

### **2.5.1. Uraian tentang proses pengusulan oleh pemangku kepentingan (masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota).**

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Aceh. BLUD RSIA dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam menjaring usulan masyarakat RSIA menyediakan sarana dalam bentuk Web, Kotak saran dan tempat pengaduan / keluhan masyarakat. Semua sarana ini bertujuan untuk menampung berbagai macam usulan dalam peningkatan pelayanan dan pengembangan rumah sakit.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di BLUD RSIA dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan jenis pelayanan dokter spesialis yang melayani sehingga waktu tunggu dapat lebih singkat.
2. Peningkatan sarana dan prasarana serta penyediaan alat kesehatan memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat.
3. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan rumah sakit.

4. Peningkatan pelayanan administrasi efektif, efisien, transparan, dan informatif.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak.

#### **2.5.2. Uraian tentang kesesuaian usulan tersebut dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.**

BLUD RSIA adalah rumah sakit baru yang sedang berkembang sehingga masih diperlukan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas melalui akreditasi, BLUD RSIA sampai saat ini masih tipe B Khusus.

Berdasarkan identifikasi permasalahan terhadap tugas pokok dan fungsi BLUD RSIA, telaah visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra K/L serta telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat ditentukan isu – isu strategis yang harus ditindaklanjuti oleh BLUD RSIA yaitu :

1. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia rumah sakit masih perlu ditingkatkan.
2. Terbatasnya sarana, prasarana terutama gedung rawat laboratorium dan poliklinik dan alat kesehatan rumah sakit.
3. Mutu dan keselamatan pasien masih perlu ditingkatkan secara terus menerus.
4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi efektif, efisien, transparan, dan informatif.

### 2.5.3. Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Adapun usulan program/kegiatan yang direncanakan disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.5 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					
0 2 0 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Banda Aceh	Outcome	Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran	95 Persen
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Banda Aceh	Outcome	Tingkat Disiplin Aparatur	95 Persen
	0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585 Orang
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Banda Aceh	Outcome	Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi	85 Persen
	0 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Banda Aceh	Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	595 Orang
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Banda Aceh	Outcome	Persentase Ketersediaan Kelengkapan Logistik Rumah Sakit	95 Persen
	0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Banda Aceh	Outcome	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Rumah Sakit	100 Persen
	0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan
	0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Orang
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Banda Aceh	Outcome	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Fungsional	98 Persen
	0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banda Aceh	Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit
	0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Banda Aceh	Outcome	Persentase Kemandirian Rumah Sakit	40 Persen
	0 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Banda Aceh	Output	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	25 Unit Kerja
0 2 0 2	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Banda Aceh	Outcome	Indeks Kepuasan Masyarakat	86 Indeks
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Banda Aceh	Outcome	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	80 Persen
	1 0 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Banda Aceh	Output	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit
	1 6 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Banda Aceh	Output	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	4 Kegiatan
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Banda Aceh	Outcome	Persentase Layanan Rumah Sakit	85 Persen
	0 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Banda Aceh	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Kegiatan

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Rumusan program dan kegiatan rumah sakit ibu dan anak disusun berdasarkan berbagai faktor yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat, sumber daya yang tersedia, dan tujuan kesehatan yang ingin dicapai. Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan rumah sakit ibu dan anak antara lain:

1. **Kebutuhan Masyarakat** : Analisis kebutuhan kesehatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam merumuskan program dan kegiatan rumah sakit. Ini melibatkan evaluasi terhadap jenis layanan kesehatan yang diperlukan, tingkat prevalensi penyakit, dan karakteristik demografis serta epidemiologis Masyarakat, serta saran dan masukan Masyarakat melalui media sosial, website, komplain secara langsung, dan evaluasi tingkat kepuasan menggunakan pendekatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.
2. **Ketersediaan Sumber Daya** : Ketersediaan sumber daya fisik, manusia, dan keuangan merupakan faktor penting dalam merumuskan program dan kegiatan rumah sakit. Ini termasuk infrastruktur kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga medis, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional rumah sakit.
3. **Kebijakan Kesehatan Nasional dan Pemerintah Aceh** : Kebijakan kesehatan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh juga mempengaruhi rumusan program dan kegiatan rumah sakit ibu dan anak.

4. **Evaluasi Program Terdahulu** : Evaluasi terhadap program-program kesehatan yang telah dilaksanakan sebelumnya juga menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan program dan kegiatan rumah sakit. Pembelajaran dari pengalaman sebelumnya dapat membantu meningkatkan desain dan implementasi program-program baru.
5. **Aspek Hukum dan Regulasi** : Aspek hukum dan regulasi terkait dengan pelayanan kesehatan, seperti standar pelayanan, persyaratan akreditasi, dan peraturan terkait pengelolaan rumah sakit, juga harus dipertimbangkan dalam merumuskan program dan kegiatan rumah sakit pemerintah untuk memastikan kepatuhan yang tepat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdiri atas 2 Program, 8 Kegiatan, dan 11 Sub Kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSIA Tahun Rencana dan Prakiraan Maju Rencana Tahun selanjutnya terdapat pada tabel berikut

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)			Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>					<b>127.370.758.157,00</b>				<b>112.508.119.461</b>		
0201	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Outcome</b>	<b>Lancarnya Kebutuhan Operasional Perkantoran</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 113.534.858.370</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 109.779.374.568</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Outcome</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 60.001.203.694</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 64.296.680.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	585	Orang/Bulan	Rp 60.001.203.694	DAU, PAA, DBH	303	Orang/Bulan	Rp 64.296.680.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>85</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 495.930.000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp -</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Banda Aceh	610	Pasang	Rp 495.930.000	OTSUS	530	Pasang	Rp -
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase Ketersediaan Kelengkapan Logistik Rumah Sakit</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 2.077.318.290</b>	<b>95</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 300.000.000</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	2	Kegiatan	Rp 2.077.318.290	OTSUS	3	Kegiatan	Rp 300.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Rumah Sakit</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 5.795.389.006</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 5.357.777.768</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banda Aceh	12	Laporan	Rp 2.076.453.471	OTSUS, PAA	12	Laporan	Rp 2.202.406.768
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banda Aceh	4	Kegiatan	Rp 3.718.935.535	OTSUS	4	Kegiatan	Rp 3.155.371.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Fungsional</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 6.061.057.963</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 2.419.516.800</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Banda Aceh	14	Unit	Rp 400.700.000	OTSUS	14	Unit	Rp 400.700.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banda Aceh	300 112 2 100 3 90 10	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit			300 112 2 100 3 90 10	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	Rp 1.218.944.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Banda Aceh	2	Kegiatan	Rp 5.660.357.963	OTSUS	2	Kegiatan	Rp 799.872.000
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase Kemandirian Rumah Sakit</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 39.103.959.417</b>	<b>40</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 37.405.400.000</b>	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Output	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Banda Aceh	3	Kegiatan	Rp 39.103.959.417	BLUD, SILPA BLUD	3	Kegiatan	Rp 37.405.400.000
0202	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Outcome</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>86</b>	<b>Indeks</b>	<b>Rp 13.835.899.787</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 2.728.744.893</b>	
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>80</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 13.125.667.787</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 1.372.194.531</b>	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Output	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Banda Aceh	1	Kegiatan	Rp 12.380.515.262	OTSUS	1	Kegiatan	Rp 736.040.006
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Output	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Banda Aceh	4	Kegiatan	Rp 745.152.525	OTSUS	4	Kegiatan	Rp 636.154.525
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Outcome</b>	<b>Persentase Layanan Rumah Sakit</b>	<b>Banda Aceh</b>	<b>85</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 710.232.000</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>Rp 1.356.550.362</b>	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Banda Aceh	2	Kegiatan	Rp 710.232.000	OTSUS	2	Kegiatan	Rp 1.356.550.362

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kaidah Pelaksanaan**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sehat, Pemerintah Aceh secara berkesinambungan terus meningkatkan upaya pelayanan kesehatan melalui usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih menitikberatkan pada usaha kuratif dan rehabilitatif tanpa mengabaikan usaha promotif dan preventif.

Untuk menilai kemajuan Rumah Sakit Ibu dan Anak diperlukan evaluasi kinerja pelayanan dan kinerja keuangan yang dilakukan setiap periode tertentu (bulanan, triwulan, semester, tahunan) tergantung kebutuhan dan unit operasional tertentu. Salah satu metode untuk menilai kinerja pelayanan adalah dengan mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal sedangkan untuk mengukur keberhasilan kinerja keuangan dengan menghitung persentase tingkat kemandirian keuangan rumah sakit.

#### **4.2. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian**

Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan renja perubahan tahun 2025 antara lain:

1. Pengembangan dan penguatan layanan khusus ibu dan anak.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta kerja sama lintas program dan lintas sektoral dalam pemenuhan kebutuhan SDM yang belum tersedia.

3. Pemeliharaan dan kalibrasi alat Kesehatan.
4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Rawat Inap
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana (AC, Mobileur, dan Alat Kesehatan)
6. Memastikan ketersediaan logistik rumah sakit.
7. Persiapan penilaian akreditasi rumah sakit syariah.
8. Peningkatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
9. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM – RS) dan E-Rekam Medik.
10. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Untuk mewujudkan rencana strategis dalam perubahan rencana kerja tahun 2025, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan anggaran yang disediakan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit, optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan pengembangan rumah sakit agar dapat bersaing dengan rumah sakit swasta.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

Untuk mewujudkan rencana kerja perubahan RSIA tahun 2025 diperlukan rencana tindak lanjut terhadap masalah – masalah yang dihadapi untuk meningkatkan kepuasan pasien. Evaluasi Renja Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2025 sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dicapai, sehingga untuk kedepannya Rumah Sakit Ibu dan Anak dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat kepada sasaran untuk meningkatkan capaian kinerja.

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang perlu dilaksanakan untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak yaitu dengan lebih fokus terhadap program-program yang strategis, meningkatkan kinerja SDM pada Rumah Sakit Ibu dan Anak yang ada saat ini untuk dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Program dan Kegiatan yang capaian kinerjanya masih kecil. Demikian Rencana Kerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh Tahun 2025 disampaikan sebagai wujud pertanggung jawaban perencanaan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD RSIA sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran.

Banda Aceh, 26 Maret 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK



**dr. NURNIKMAH, M.Kes**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19680909 200003 2 006



PEMERINTAH ACEH

# RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 03 Banda Aceh Kode Pos: 23231

Telepon: (0651) 637796 Website: [rsia.acehprov.go.id](http://rsia.acehprov.go.id) E-mail: [rsia@acehprov.go.id](mailto:rsia@acehprov.go.id) Faksimil: (0651) 638331

Nomor : 709 / 0689 / 2025  
Lampiran : 1 (satu) Eks  
Sifat : Penting  
Hal : Penyampaian Rancangan  
Perubahan Renja RSIA Tahun  
2025

Banda Aceh, 25 Maret 2025

Yang Terhormat,  
Kepala BAPPEDA Aceh  
di –

Banda Aceh

1. Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Aceh Nomor : 000.7/3194, Tanggal : 19 Maret 2025, Hal : Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPA Tahun 2025.
2. Terlampir kami sampaikan Rancangan Perubahan Renja RSIA tahun 2025 dalam bentuk *softcopy* (pdf) dan *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar.
3. Demikian disampaikan dan terima kasih.

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK



dr. NURNIKMAH. M. Kes

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19680909 200003 2 006